

**PERSEPSI MASYARAKAT SETEMPAT ATAS RENCANA
PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DI KECAMATAN
SAMARINDA ULU**

***PERCEPTION OF LOCAL COMMUNITY TOWARDS THE RETENTION
POOL DEVELOPMENT PLAN IN SUB DISTRICT OF SAMARINDA ULU***

Thomas Robert Hutaaruk

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda
Jl. Muhammad Yamin No 78 RTVII Kota Samarinda 75119 Kalimantan Timur
Email: thomas_huta@yahoo.com

Diterima: 25 Mei 2021; Direvisi: 16 Juni 2021; Disetujui: 30 Juni 2021

ABSTRACT

The social approach is carried out by providing understanding and awareness in environmental management, while the technological approach is through the method of building flood control infrastructure a "retention pool". Retention pool development is intended to allocate abundance of water when the rain intensity is high and has the potential to cause flooding. Retention pool development will have environmental impacts, both positive and negative. Research concerning the perceptions and attitudes of the community is needed to decide whether the retention pool development work is appropriate to continue or otherwise be stopped.

The purpose of this study was to determine the perceptions and attitudes of the local community regarding the plan to construct flood control buildings. The method used was a survey and analyzed by means of a qualitative descriptive.

The results of the study concluded that the people who were affected by the floods in Bukit Pinang were generally residents who had lived for more than five years with the status of their own residence; so that you have enough experience with the floods that occur. The community is willing to provide support for government programs related to efforts to overcome floods, one of which involves providing land for the construction and development of retention ponds. For that we need good communication from the government.

Keywords: *flood, retention pool, perceptions and attitudes.*

ABSTRAK

Salah satu persoalan utama lingkungan di Kota Samarinda adalah banjir. Banjir yang terjadi 2 – 3 kali setahun memerlukan penanganan serius karena secara ekonomi telah menyebabkan kerugian cukup besar bagi masyarakat, mulai dari hambatan aktifitas hingga kerusakan material. Untuk mengatasi masalah banjir di Samarinda dapat dilakukan melalui pendekatan sosial dan teknologi. Kedua pendekatan ini diberlakukan sesuai dengan karakteristik penduduk di wilayah terdampak. Baik dengan masing-masing pendekatan ataupun kombinasi keduanya. Pendekatan sosial dilakukan dengan cara memberi pemahaman dan kesadaran dalam penataan lingkungan, sedangkan pendekatan teknologi melalui metode pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Salah satu bentuk bangunan pengendali banjir adalah “kolam retensi”. Pembangunan kolam retensi dimaksudkan untuk mengalokasikan kelimpahan air saat intensitas hujan tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir. Pembangunan kolam retensi akan berdampak lingkungan, baik bersifat positif maupun negatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana pembangunan kolam retensi dalam upaya mengatasi masalah banjir. Melalui persepsi dan sikap masyarakat ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk

menentukan apakah rencana pembangunan kolam retensi di lokasi studi layak dilanjutkan atau tidak layak dilanjutkan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi dan sikap masyarakat setempat atas rencana pendirian bangunan pengendali banjir di Kecamatan Samarinda Ulu. Jenis penelitian adalah survey dan dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang terdampak banjir umumnya adalah penduduk yang telah berdomisili lebih dari 5 tahun dengan status tempat tinggal milik sendiri; sehingga memiliki pengalaman yang cukup terhadap banjir yang terjadi. Masyarakat bersedia memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait upaya mengatasi banjir, yang salah satunya menyangkut penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan kolam retensi. Untuk itu perlu ada komunikasi yang baik dari pihak pemerintah.

Kata kunci: banjir, kolam retensi, persepsi dan kolam retensi

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan utama lingkungan Kota Samarinda adalah banjir. Dari aspek Topografi diketahui bahwa daerah ini berada pada elevasi antara 1 - 4 m di atas permukaan laut (RTRW Kota Samarinda 2014-2034). Dengan kondisi topografi seperti ini dapat diindikasikan bahwa kota Samarinda rentan terhadap genangan banjir saat musim hujan apalagi saat musim hujan sedang terjadi air sungai Mahakam pasang. Intensitas hujan yang tinggi, disertai keterbukaan lahan yang semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk menyebabkan banjir yang terjadi di Kota Samarinda terus meluas dari tahun ke tahun. Di sisi lain permasalahan banjir di Kota Samarinda terjadi akibat berlebihnya limpasan permukaan dan tidak tertampungnya limpasan tersebut dalam badan sungai sehingga air meluap (Setiawan *et al.*, 2020).

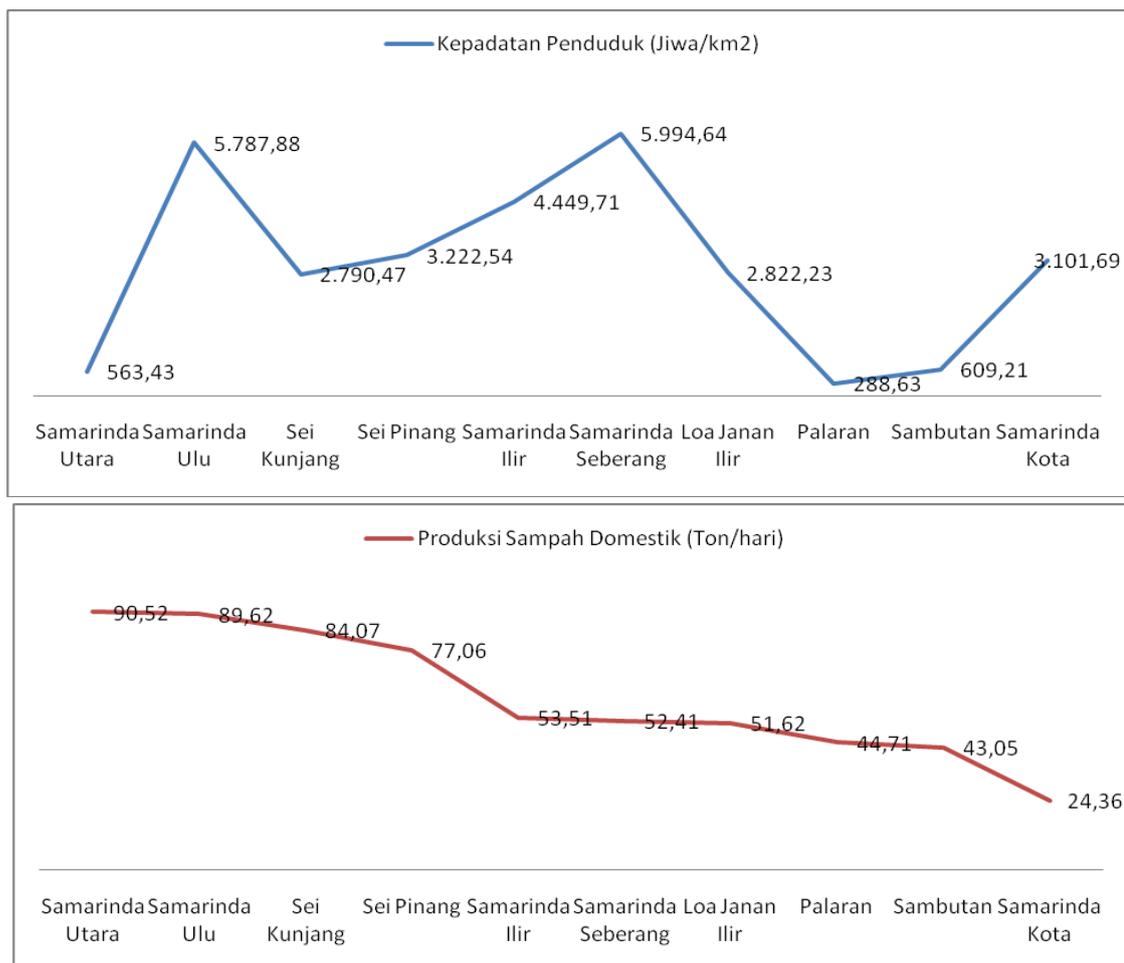
Peran pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi masalah banjir sebagaimana hasil penelitian Suryadi (2020). Untuk mengatasi permasalahan banjir di Samarinda, Pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 131 miliar dan dari Pemprov. Kaltim sebesar Rp. 315 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk merealisasikan 4 program utama, yaitu pembangunan turap di daerah aliran sungai, pembangunan jalan di kawasan pemukiman, pembangunan dan pemaksimalan fungsi dan saluran drainase. Penggelontoran dana penanggulangan banjir sendiri hampir tiap tahun dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda. Pada tahun 2018, melalui APBD Samarinda dikururkan dana sebesar Rp. 81 miliar, ditambah Rp. 53 miliar dari Bantuan Keuangan Pemprov. Kaltim. Sedangkan pada tahun 2019 Samarinda mendapatkan bantuan keuangan dari APB Prov. Kaltim sebanyak Rp. 172,8 miliar, untuk mendukung dana dari APB Samarinda sebesar Rp. 73,6 miliar. Bila dilihat dari aspek anggaran, maka selama tiga tahun terakhir 2018 – 2020 cenderung ada peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan dalam mencegah sekaligus pemulihan pasca banjir di Kota Samarinda yang terjadi setiap tahunnya.

Kerugian material pun yang dialami pemerintah maupun masyarakat tidak kalah besarnya, misalnya dari hasil perhitungan kerugian ekonomi akibat banjir di kawasan bantaran Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Utara sebesar Rp. 4.444.160.000 per minggu (Thomas *et al.*, 2020).

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengatasi masalah pembangunan. Namun, demikian untuk mengatasi masalah pembangunan juga dibutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan beserta dampaknya tidaklah dapat dilepaskan. Karena semakin meningkatnya kebutuhan, maka pembangunan yang dibutuhkan juga akan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Implikasi dari pembangunan adalah munculnya dampak

lingkungan, baik itu yang bersifat membangun (positif) maupun merusak (negatif). Demikian pula dalam hal terjadinya banjir di Samarinda juga bagian dari kontribusi aktifitas masyarakat yang merusak lingkungan, di antaranya adalah perubahan fungsi lahan (seperti: menimbun dan mendirikan bangunan permanen di atas kawasan resapan air, mendirikan bangunan di atas sempadan sungai), membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mencatat rata-rata produksi sampah domestik di Kota Samarinda mencapai 610,93 ton per hari (0,7 Kg per Orang per hari), sekitar 17 – 19% di antaranya merupakan sampah plastik. Sampah terangkut di Kota Samarinda hanya mencapai 61,86%; sedangkan sekitar 38,14% sampah tidak terangkut. Produksi Sampah domestik tertinggi ada di Kecamatan Samarinda Utara (90,52 Ton/hari) dengan kepadatan penduduk mencapai 563,43 Jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan penduduk mencapai 5.994,64 Jiwa/km² menghasilkan sampah domestik 52,41 Ton/hari. Artinya tidak ada korelasi antara kepadatan penduduk dengan volume sampah domestik yang dihasilkan. Namun demikian produksi sampah berkorelasi positif dengan jumlah penduduk.



Gambar 1. Kepadatan Penduduk dan Produksi Sampah Domestik di Kota Samarinda Per Kecamatan Tahun 2019

Di sisi lain ada korelasi yang kuat antara persoalan sampah dengan terjadinya banjir di Samarinda, dan akar persoalan utama di sini adalah partisipasi masyarakat. Semakin banyak sebaran tumpukan sampah di suatu tempat di dataran rendah, akan memiliki peluang semakin tinggi intensitas banjir yang mengenai daerah tersebut.

Sebagai tindakan preventif atas bencana banjir yang terjadi diperlukan upaya tindakan dari pemerintah di satu sisi dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di sisi yang lain. Namun ketika banjir telah menjadi bencana maka diperlukan tindakan mitigasi. Dalam sistem pengelolaan bencana terdapat empat fase utama yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan dan pembangunan yang dilihat secara siklus dan aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu ada pula siklus manajemen bencana yang terdiri atas mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, pembangunan, dan pencegahan yang seluruhnya menjadi suatu siklus yang tertutup (Carter, 1991).

Langkah pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi masalah banjir membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Meskipun telah dilakukan pembangunan pengendali banjir di beberapa tempat, namun secara kuantitas banjir yang terjadi bertambah luas dan bangunan pengendali yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seakan ada gap kepentingan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi banjir, sementara di sisi lain masih kurang pedulinya masyarakat atas kondisi lingkungan yang ada yang sebagai pemicu terjadinya banjir. Salah satu lokasi yang mengalami banjir cukup parah di Kota Samarinda adalah di Kelurahan Bukit Pinang. Sehubungan dengan pembangunan Kolam Retensi sebagai pengalih banjir, diperlukan dukungan masyarakat secara aktif baik berupa pembebasan lahan, penataan lingkungan, perawatan bangunan hingga pencegahan kerusakan. Dukungan masyarakat akan tercermin dari persepsi yang diungkapkan. Penelitian ini dibuat untuk melakukan penilaian atas persepsi masyarakat setempat sehubungan dengan pembangunan kolam retensi di Kelurahan Bukit Pinang.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan merespon informasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya (Schermerhorn, 2010). Setiap orang akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap satu situasi yang sama karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Schermerhorn mendeskripsikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi berasal dari tiga karakteristik elemen persepsi sebagai berikut: 1) Pihak yang memberikan persepsi (*The Perceiver*), proses persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu orang yang memberikan persepsi, kebutuhan dan motivasinya, kepribadiannya, nilai dan perilaku yang dimilikinya; 2) Konteks situasi atau karakteristik dari keadaan yang sedang terjadi (*Characteristics of the setting*), yang terdiri dari konteks fisik, konteks sosial, dan konteks organisasional; 3) Karakteristik dari sesuatu yang sedang dipersepsikan (*The Perceived*) baik itu orang, benda, acara, atau kegiatan dalam kondisi tingkat kekontrasan, intensitas, ukuran, pergerakan, pengulangan atau pembaharuan, dan lain-lain

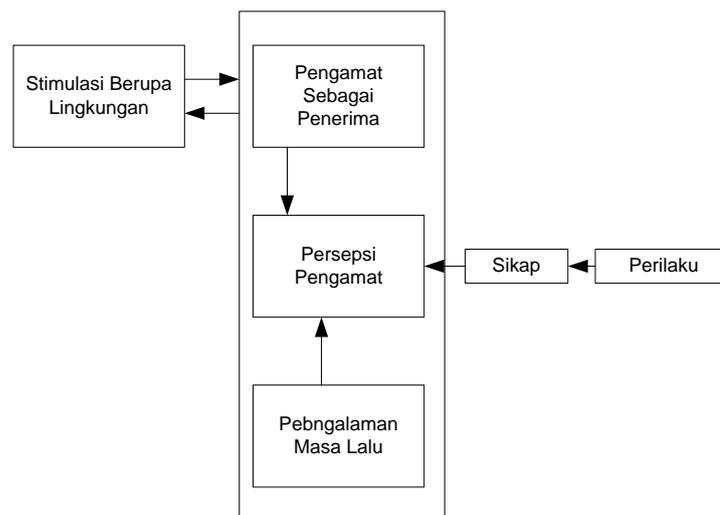
Proses pembentukan persepsi secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian proses pembentukan persepsi, dan akhirnya terbentuklah suatu respon yang disebut sebagai persepsi. Tahapan dari proses pembentukan persepsi yaitu di antaranya proses pemilihan dan perhatian terhadap informasi, organisasi informasi, interpretasi informasi, dan yang terakhir pengambilan informasi. Dalam proses pembentukan persepsi ini, pemberian informasi mengenai objek yang dipersepsikan menjadi unsur penting karena akan sangat berpengaruh terhadap proses organisasi dan interpretasi orang yang memberikan persepsi. Diperlukan penyamarataan pemberian informasi mengenai objek yang akan dipersepsikan agar tidak terjadi distorsi informasi sehingga adanya penyimpangan dalam memberikan persepsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sendiri yaitu terdiri dari tiga elemen, yaitu konteks situasi, karakteristik dari objek persepsi, dan karakteristik orang yang melakukan persepsi (Schermerhorn, 2010), sehingga pada akhirnya terbentuklah suatu persepsi yang

akan menghasilkan respon berupa perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang terhadap suatu informasi.

Menurut Teori *transactional* yang dicetuskan oleh Mead tahun 1903, Dewey dan Bentley tahun 1949, Ames tahun 1960 menekankan peran pengalaman dalam persepsi dan berfokus pada hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungan. Persepsi dipertimbangkan sebagai suatu transaksi dimana lingkungan, pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lainnya. Teori ini membuat sejumlah asumsi sebagai berikut: 1) Persepsi adalah multi modal; 2) Persepsi adalah sesuatu yang aktif dan bukan merupakan proses yang pasif; 3) Persepsi tidak dapat dijelaskan dengan pembagian perilaku kedalam *perceiver* dan dirasakan; 4) Persepsi tidak dapat dijelaskan yang berkaitan dengan respons yang dikondisikan ke stimuli; 5) Hubungan antara orang dengan lingkungan adalah sesuatu yang dinamis; 6) *Image* lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada pengalaman masa lalu, motivasi masa sekarang dan sikap; 7) Pengalaman masa lalu diproyeksikan ke situasi masa sekarang dalam hubungannya dengan kebutuhan seseorang.

Bila diurutkan, maka proses terjadinya persepsi menurut *transactional theory* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Proses Terjadinya Persepsi Menurut *Transactional Theory*

Dari gambar di atas di sini Nampak bahwa persepsi terbentuk karena adanya pengalaman yang mendorong seseorang bersikap. Pengalaman baik akan membentuk persepsi positif, sebaliknya pengalaman buruk seseorang akan membentuk persepsi negative. Sehingga untuk membentuk pengalaman buruk menjadi persepsi positif membutuhkan fakta-fakta dan data yang meyakinkan, disertai juga komitmen dan niat baik.

Persepsi responden di lokasi penelitian juga akan dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama tinggal dan juga memiliki pengetahuan untuk membandingkan apa yang terjadi di tempat lain dengan rencana pembangunan “kolam retensi”. Persepsi akan positif ketika “kolam retensi” yang dibangun memiliki nilai guna dalam pengendalian banjir ataupun nilai guna tambah lainnya, misal sebagai taman wisata air, taman kuliner, dan sebagainya. Sebaliknya persepsi menjadi negative bila “kolam retensi” hanya tidak mampu mengatasi masalah banjir dan tidak memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Dengan demikian faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal (berupa: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan) dan faktor eksternal (berupa: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung) (Gibson *et al.*, 2012). Selanjutnya menurut Rini Sabarini (2021), secara

psikologis persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh: factor fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, mood dan gerakan.

Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanyakemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara survey, dengan sumber data berupa hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di kawasan rencana pembangunan kolam retensi di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun lokasi pengambilan sampel responden dibagi menjadi tiga cluster, yaitu: 1) Cluster I: kawasan terdampak banjir dan terkena dampak langsung pembangunan kolam retensi; 2) Cluster II: kawasan terdampak banjir, namun tidak terkena dampak langsung pembangunan kolam retensi; dan 3) Cluster III: kawasan tidak terdampak banjir namun terkena dampak langsung pembangunan kolam retensi.

Pengambilan sampel responden dengan cara *aksidental sampling*. Dengan cara ini diperoleh sebanyak 59 responden. Data yang diperoleh dikumpulkan, diolah, disusun tabulasi, dan dikompilasi, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Studi

Kelurahan Bukit Pinang berada dalam wilayah administrasi Kota Samarinda yang memiliki luas wilayah 349,86 Ha, dengan batas-batas: Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Air Putih; Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Loa Bahu; dan Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara.

Jumlah penduduk Kelurahan Bukit Pinang hingga Juni 2020 sebanyak 8.412 Jiwa (2.216 KK), terdiri dari 4.265 Jiwa laki-laki dan 4.147 Jiwa perempuan.

Tingkat pendidikan formal cukup beragam, ada sebanyak 8.407 orang (99,94%) mengalami pendidikan formal dari Tingkat TK hingga Pascasarjana, terbanyak penduduk berpendidikan SD Sederajat hingga SMA sederajat (88,22%). Dalam hal ini tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi dan kepedulian seseorang terhadap keadaan lingkungan hidup. Nampak dari tingkat pendidikan formal penduduk, memiliki kemampuan cukup baik dalam mengolah informasi, namun dalam hal kepedulian lingkungan ada perbedaan persepsi dengan tingkat pendidikan yang berbeda (Tabel 1).

Dari Tabel 1, data monografi Kelurahan Bukit Pinang mencatat terdapat 3,66% penduduk berpendidikan Taman Kanak-kanak; 41,17% penduduk berpendidikan SD sederajat; 24,48% berpendidikan SMA Sederajat; 22,60% berpendidikan SMP Sederajat; 7,54% berpendidikan Diploma hingga Sarjana; dan 0,52% berpendidikan Pascasarjana.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Formal Penduduk Bukit Pinang Per Juni 2020

Deskripsi	Jumlah (Org)	Proporsi (%)
Pendidikan Formal		
Taman Kanak-kanak	308	3.66
Sekolah Dasar	3,461	41.14
SMP	1,901	22.60
SMA/SMU	2,059	24.48
Akademi/D1-D3	217	2.58
Sarjana	417	4.96
Pascasarjana	44	0.52
Mata Pencaharian		
PNS	459	6.76
ABRI (TNI/Kepolisian)	38	0.56
Kary. Swasta	2,050	30.20
Wiraswasta/Pedagang	265	3.90
Tani	160	2.36
Pertukangan	246	3.62
Buruh Tani	86	1.27
Pensiunan	95	1.40
Pemulung	165	2.43
Jasa	4,848	71.41

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak berada pada usia lebih dari 18 tahun atau usia produktif. Penduduk usia produktif adalah mereka yang berada pada usia angkatan kerja dan melakukan pekerjaan di sektor formal, nonformal maupun informal. Selain itu, apa yang mereka dapatkan dapat bersifat penghasilan aktif maupun pasif. Dari penghasilan yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan aktifitas pertukaran barang dan/atau jasa. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka daya ekonomi yang dimiliki juga akan semakin besar, demikian juga sebaliknya (Tabel 2). Daya beli ekonomi yang tinggi cenderung menghasilkan limbah yang juga tinggi. Kemampuan daya beli akan mendorong seseorang untuk cenderung konsumtif dan menyisakan limbah dari apa yang dikonsumsi. Bila penghasilan yang diterima digunakan untuk membeli suatu jenis barang, maka sisa dari bagian barang yang tidak terpakai akan menjadi limbah.

Berdasarkan pekerjaan utama, dari 6.789 orang penduduk usia kerja (12 tahun ke atas), terbanyak adalah bekerja di sektor nonformal (penyedia jasa, pertukangan, pemulung) (77,46%) dan karyawan swasta (30,20%). Selain itu juga terdapat wiraswasta/pedagang (3,90%) dan Pegawai Negeri Sipil/ABRI (7,32%), pengolahan lahan (tani, buruh tani) (3,62%), dan pensiunan (tidak bekerja namun penerima upah) (1,40%),

Karakteristik Responden

Proses wawancara dilakukan terhadap 59 responden yang tersebar di 3 Cluster, sebanyak 39 responden berada di Cluster I (14 laki-laki, 25 perempuan), 10 responden di Cluster II (5 laki-laki, 5 perempuan), dan 10 responden di Cluster III (6 laki-laki, 4 perempuan). Usia responden antara 20 – 64 tahun, dengan usia terbanyak antara 46 – 55 tahun. Kebanyakan responden telah berdomisili di lokasi studi sekurang-kurangnya 10 tahun. Rata-rata kepala keluarga di lokasi studi memiliki tanggungan 4 jiwa.

mengandalkan penghasilan pokok, namun harus ada pekerjaan sampingan yang memberikan dorongan terhadap daya beli dan melakukan simpangan. Sementara investasi hanya bisa dilakukan setelah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tercukupi.

Tabel 2. Penghasilan dan Pengeluaran Responden per Bulan (%)

Alokasi Pengeluaran	Cluster I	Cluster II	Cluster III
Bahan Makanan	58,90	67,27	61,23
Non Bahan Makanan	41,10	32,73	38,77

Kualitas Bangunan dan Kepemilikan Aset

Kualitas bangunan tempat tinggal dapat dilihat dari bahan yang digunakan untuk dinding, lantai dan atap. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari ketiga Cluster, sebanyak 80% responden memiliki rumah berdinding beton dan 20% responden memiliki rumah berdinding papan. Di Cluster I sebanyak 43,75% responden memiliki rumah dengan dinding yang terbuat dari beton dan 5% responden memiliki rumah dengan dinding dari papan. Pada Cluster II dan Cluster III, sebanyak 86,44% responden memiliki dinding rumah dari beton dan 13,56% responden memiliki rumah berdinding dari papan. Dari bahan dinding yang digunakan nampak bahwa penduduk di lokasi studi didominasi oleh rumah permanen.

Lantai rumah responden ada yang berupa semen dan papan. Hasil wawancara diperoleh informasi sebanyak 91,53% responden memiliki rumah dengan lantai terbuat dari semen dan 8,47% lainnya berupa papan. Pembuatan lantai rumah dari semen menunjukkan adanya proses penimbunan dan pemadatan tanah sebelum bangunan berdiri. Kebanyakan tanah-tanah di Samarinda yang memiliki bangunan permanen, berada di kawasan resapan air (rawa) yang ditimbun dan dipadatkan. Salah satu pemicu dari terjadinya banjir adalah penimbunan dan berdirinya bangunan permanen di kawasan resapan air. Secara fisiografis, sekitar 13,20% wilayah Samarinda berupa lembah aluvial; 14,66% berupa daerah dataran; 13,42% berupa dataran berombak; 2,33% berupa dataran bergelombang; 41,12% berupa daerah patahan; 0,88% berupa daerah berbukit; 0,30% berupa rawa; 7,40% berupa sungai; dan 6,79% berupa lainnya (Anonim, 2020). Untuk Cluster I berupa daerah dataran dan rawa.

Tabel 3. Kualitas Bangunan

Deskripsi	Cluster I		Cluster II		Cluster III		Jumlah	
	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Dinding Rumah								
Beton	35	43,75	8	80	8	80	51	86,44
Setengah tembok	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Papan	4	5	2	20	2	20	8	13,56
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lantai Rumah								
Semen	35	43,75	10	100	9	90	54	91,53
Papan	4	5	0	0	1	10	5	8,47
Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Atap Rumah								
Genting	7	8,75	0	0	0	0	7	11,86
Seng	32	40	10	100	10	100	52	88,14
Nipah	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Atap rumah responden berupa genying dan Seng. Hasil wawancara diperoleh informasi sebanyak 88,14% responden menggunakan atap rumah yang terbuat dari seng dan 11,86% berupa genting. Penggunaan seng oleh kebanyakan masyarakat karena memiliki harga relatif murah, tahan lama, mudah dibentuk dan mudah diperoleh.

Menyangkut kepemilikan aset, status kepemilikan rumah 77,97% responden merupakan milik sendiri; 15,25% responden sewa; dan 6,78% menumpang pada keluarga. Bangunan rumah tersebut diperoleh dengan cara membangun sendiri (38,98% responden), mendapat warisan (10,17% responden), membeli dari pihak kedua (42,37%), dan lain-lain (8,47% responden). Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa rumah yang ditempati sebagai besar penduduk di lokasi studi merupakan rumah milik sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak kedua. Luas lahan bangunan yang dimiliki responden kebanyakan kurang dari 150 M² (52,54% responden) dan antara > 150 – 250 M² (42,37% responden). Luas bangunan tempat tinggal yang dimiliki kebanyakan kurang dari 150 M² (59,32% responden) dan antara > 150 – 500 M² (38,98% responden). Di sini nampak bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki hanya cukup untuk mendirikan bangunan tempat tinggal.

Tabel 4. Status Kepemilikan Rumah

Deskripsi	Cluster I		Cluster II		Cluster III		Jumlah	
	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Status Rumah								
Milik sendiri	29	36,25	9	90	8	80	46	77,97
Sewa	7	8,75	1	10	1	10	9	15,25
Menumpang Klga	3	3,75	0	0	1	10	4	6,78
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cara Memperoleh Rumah	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Membangun sendiri	13	16,25	6	60	4	40	23	38,98
Warisan	3	3,75	0	0	3	30	6	10,17
Membeli dari pihak kedua	20	25	3	30	2	20	25	42,37
Lain-lain	3	3,75	1	10	1	10	5	8,47
Luas Lahan Rumah	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Kurang dari 150 M ²	28	35	2	20	1	10	31	52,54
Antara 150 – 250 M ²	10	12,5	6	60	9	90	25	42,37
Antara > 250 – 500 M ²	1	1,25	1	10	0	0	2	3,39
Lebih dari 500 M ² n	0	0	1	10	0	0	1	1,69
Luas Bangunan	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Kurang dari 150 M ²	26	32,5	5	50	4	40	35	59,32
Antara 150 – 250 M ²	13	16,25	4	40	6	60	23	38,98
Antara > 250 – 500 M ²	0	0	1	10	0	0	1	1,69
Lebih dari 500 M ² n	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Luas Lahan selain lahan rumah	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%	Resp.	%
Kurang dari 1 Ha	39	48,75	9	90	10	100	58	98,31
Antara 1 - 2 Ha	0	0	1	10	0	0	1	1,69
Antara > 2 - 5 Ha	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lebih dari 5 Ha	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Berdasarkan catatan tempat-tempat di Kelurahan Bukit Pinang yang mengalami banjir, dari 21 RT, daerah yang rawan banjir ada 5 wilayah RT (RT 13, RT 03, RT 15, RT 16 dan RT 17). Namun, yang terparah adalah di RT 13. Sementara 16 wilayah RT lainnya cukup aman dari bencana banjir. Menurut responden di lokasi studi, penyebab banjir adalah sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, buruknya kondisi drainase, bangunan di atas badan sungai, galian C, meningkatnya lahan terbuka, air kiriman, intensitas hujan yang tinggi.

Berdasarkan pengalaman menghadapi banjir bagi responden yang berada di Cluster I dan Cluster II, sebanyak 91,8% responden mengalami banjir lebih dari 5 kali, dan 8,16% responden mengalami banjir antara 2 – 3 kali. Masyarakat di lokasi studi mengalami banjir 1 – 2 kali dalam setahun, yang biasanya terjadi di awal tahun. Kebanyakan responden mengalami banjir terparah pada kedalaman lebih dari 30 Cm. Bahkan ada rumah masyarakat yang pernah mengalami banjir hingga lebih dari 100 Cm (Gambar 4). Lama genangan air menurut 28,6% responden kurang dari 1 jam; sedangkan menurut 55,1% responden antara 1 – 3 jam; namun nampaknya tidak lebih dari 12 jam.

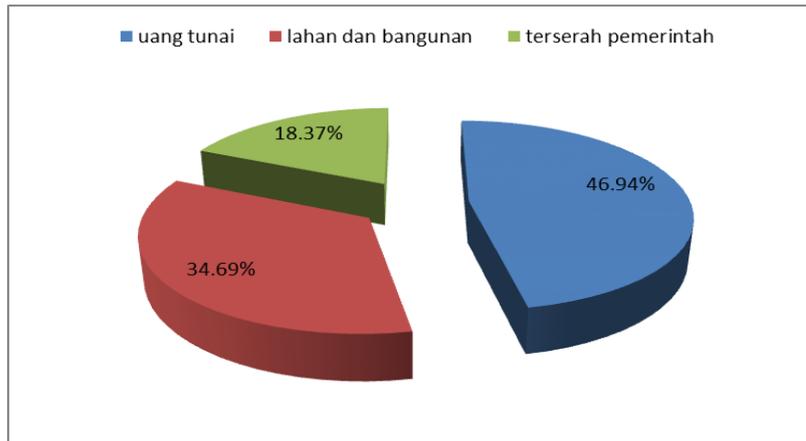
Apabila terjadi banjir maka sebagian besar responden menjawab memilih tetap tinggal di rumah, meskipun ada juga yang mengungsi sementara di rumah keluarga atau ke rumah tetangga yang posisinya lebih aman. Pengalaman menghadapi banjir berulang kali menimbulkan harapan bagi responden untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Mereka berharap permasalahan yang dihadapi dapat teratasi, masyarakat dapat hidup secara normal tanpa ada kekhawatiran datangnya banjir.

Persepsi Masyarakat Terdampak Banjir

Secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif. b. Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan. (Mulyana, 2005). Lebih lanjut Moran (2005) mengatakan bahwa persepsi diri seseorang sangat bergantung pada bagaimana cara untuk menghargai dirinya, dengan kata lain semakin baik penghargaan diri seseorang maka akan semakin mempermudah cara pengambilan sebuah keputusan. Di sini persepsi seseorang dibentuk oleh 3 faktor penting, yaitu pelaku persepsi, target yang ingin dicapai dan situasi yang dihadapi.

Persepsi terhadap dampak banjir yang terjadi di lokasi studi, sebanyak 1,69% responden menjawab biasa saja; 55,93% responden menjawab menghambat aktifitas; 10,17% responden menjawab tanggung jawab pemerintah dan 15,25% responden menjawab tanggung jawab bersama. Pembangunan kolam retensi membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup, baik untuk bangunan utama maupun utilitas di sekitar bangunan utama. Sementara lahan yang tersedia merupakan lahan milik perorangan yang harus dibebaskan dan sebagian tempat tinggal yang harus direlokasi; sebanyak 45,76% responden menjawab setuju; 8,47% responden menjawab setuju, namun 22,03% responden menjawab kurang setuju.

Apabila terpaksa juga harus dilakukan relokasi lebih luas lagi sebagai dampak pengembangan bangunan kolam retensi, untuk responden di Cluster I dan Cluster III (49 responden), sebanyak 46,94% responden berharap adanya penggantian yang tidak merugikan berupa uang tunai; 34,69% responden berharap penggantian berupa lahan dan bangunan; dan 18,37% responden menjawab terserah kompensasi yang diberikan pemerintah (Gambar 4). Apabila kompensasi yang diberikan pemerintah sesuai dengan harapan, maka masyarakat cenderung akan memiliki persepsi positif untuk mendukung program pemerintah, namun bila kompensasi tidak sesuai harapan maka akan membentuk persepsi negatif dan cenderung menimbulkan sikap yang menghambat program pemerintah.



Gambar 4. Kompensasi yang Diharapkan Bila Terkena Relokasi

Meskipun banjir kerap terjadi di lokasi studi, namun tidak membuat masyarakat berkeinginan pindah ke tempat lain. Persepsi masyarakat sebagaimana disampaikan responden bahwa bila harus pindah ke tempat lain membutuhkan biaya yang cukup besar, perlu penyesuaian dengan lingkungan baru yang belum tentu lebih nyaman, dan menyadari bahwa sebagian besar wilayah Samarinda merupakan kawasan rawan banjir. Sebagaimana pendapat responden bahwa adanya harapan pemerintah dapat mengatasi banjir di tempat mereka, kesediaan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah. Dukungan yang diberikan dapat berupa kesediaan membebeaskan lahan yang dimiliki untuk kepentingan umum (33,90% responden), bersedia mengikuti aturan pemerintah dalam mendirikan bangunan (20,34% responden), dan turut serta mencegah timbunan sampah di mana-mana dan memperbaiki drainase (25,42% responden). Masyarakat berpandangan bahwa perbaikan lingkungan merupakan tugas dari pemerintah (daerah), karena itu kebijakan pemerintah juga akan berpengaruh pada kondisi lingkungan.

Dari jawaban responden tersebut diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Kegagalan dalam proses relokasi masyarakat adalah berkaitan dengan persepsi dari masyarakat itu sendiri. Kegagalan dapat terjadi karena persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi berupa komunikasi antar *stakeholder* belum baik (Harliani, 2014). Sebaliknya dengan komunikasi yang baik akan memberikan dukungan yang kuat terhadap program relokasi yang dimaksud. Komunikasi yang baik ditandai dengan adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah tanpa adanya ancaman, tekanan ataupun paksaan.

Persepsi akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini terdapat Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan) (Suroso *et al.*, 2014).

Berbeda dengan kondisi masyarakat kota, di desa terdapat beberapa factor yang dapat menjadi penghambat pembangunan, antara lain pengetahuan, pendidikan, dan faktor pekerjaan masyarakat (Maros *et al.*, 2020), Namun di masyarakat kota rendahnya partisipasi lebih dilatar belakangi kepentingan individu atau kelompok. Misalnya, kesulitan pembebasan lahan untuk kepentingan umum lebih dominan dilatar belakangi oleh harga tanah yang tinggi yang sukar dipenuhi pemerintah.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, penelitian ini semakin mempertegas pentingnya pendekatan sosial di dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui pendekatan sosial akan terungkap hal-hal yang diharapkan dan kesediaan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana tergambar dari persepsi yang disampaikan. Beberapa penelitian terdahulu yang cenderung menyelesaikan permasalahan banjir dengan pendekatan teknis akan menjadi semakin baik dengan pendekatan sosial yang penulis lakukan. Pensinergian pendekatan sosial dan teknis akan membantu memperkaya referensi bagi stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang terdampak banjir umumnya adalah penduduk yang telah berdomisili lebih dari 5 tahun dengan status tempat tinggal milik sendiri; sehingga memiliki pengalaman yang cukup terhadap banjir yang terjadi. 2) Masyarakat bersedia memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait upaya mengatasi banjir, yang salah satunya menyangkut penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan kolam retensi. Untuk itu perlu ada komunikasi yang baik dari pihak pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dewan Editor dan Reviewer yang berkenan melakukan koreksi atas naskah ini sehingga layak untuk dipublikasikan. Terima kasih kepada manajemen STIMI Samarinda yang memfasilitasi penelitian ini, responden yang bersedia memberikan informasi dan pihak-pihak terkait lainnya atas dukungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, W. N. (1991). *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank
- Harliani, F. (2014). Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* vol. 25 (1): 37-57.
- Hutaauruk, T. R.; Kusuma, A. R.; Nengsih, W. (2020). Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir Pada Kawasan Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa*. Vol. 2 (1): 47 – 59.
- Maros, A; Sunaryo,J; Al Hidayat, N. (2020). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Teluk Panjang. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2.
- Moran, C.D. (2005). *The Role of Contextual Influence on Self Perceptions of Identity*. ProQuest.
- Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rini Sabarini. (2021). 7 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Manusia Menurut Psikologi. <https://dosenpsikologi.com/faktor-yang-mempengaruhi-persepsi>
- Sechermerhorn, J. R. (2010). *Organizational Behavior 12th Edition*. United States: Wiley.
- Setiawan, H; Jalil, M; Enggi, S. M; Purwadi, F; Adios, C; Brata, Brata, A.W; Jufda, A.S. (2020). Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 20, No.1: 39 – 42.
- Suroso, H; Hakim, A; Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Wacana – Vol. 17, No. 1: 7 – 15*.
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda. *E Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 No. 2: 425 – 436.